



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.92>

Strategi Kebijakan Mengatasi Pengangguran Terbuka Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan

¹⁾Billy Jenawi, ²⁾Riau Sujarwani, ³⁾Shaza Amira

^{1), 2), 3)}Prodi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Email: billyjenawi08@gmail.com

Abstract

Unemployed are people who do not have the opportunity to work, but are looking for work or residents who are not looking for work because they feel it is impossible to get a job. It can be seen that vocational education is still a problem to get jobs because residents with vocational education are not necessarily able to guarantee to get jobs easily and also lack of human resources in each individual. This research was conducted on the basis of finding out how the policy strategy to overcome open unemployment was for graduates of Vocational High Schools (SMK) in Bintan Regency. The purpose and intent of this paper is to find out how the policy strategy to overcome open unemployment is for graduates of Vocational High Schools (SMK) in Bintan Regency. In this study, the method used is descriptive qualitative, in which the author must obtain the widest and deepest possible information. So it can be concluded from the research that there is no policy strategy to overcome open unemployment for graduates of Vocational High Schools from the Bintan Regency Manpower Office and Riau Islands Province Education Office. However, to overcome this unemployment, the Manpower Office of Bintan Regency and the Riau Islands Province Education Office have programs to reduce the open unemployment rate of Vocational High School graduates in Bintan Regency.

Keywords: Policy Strategy, Open Unemployment, Vocational High School

Abstrak

Pengangguran adalah orang yang tidak mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Bisa dilihat bahwa pendidikan SMK masih menjadi masalah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan karena penduduk dengan pendidikan SMK belum tentu bisa menjamin untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dengan mudah dan juga kurangnya sumber daya manusia di setiap individunya. Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan mengatasi pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan. Tujuan dan maksud dari penulisan ini yaitu mengetahui bagaimana strategi kebijakan mengatasi pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis harus mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian adalah strategi kebijakan untuk mengatasi pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tidak ada yang khusus untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bintan. Tetapi untuk mengatasi pengangguran tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai program-program untuk mengurangi angka pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bintan.

Kata Kunci: Strategi Kebijakan, Pengangguran Terbuka, Sekolah Menengah Kejuruan



PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan suatu yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh setiap orang pada umumnya. Karena itu setiap orang berusaha untuk tidak menganggur dengan cara mencari pekerjaan. Dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan, dan dengan penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, demikian, dorongan bekerja tidak hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan melainkan juga digunakan untuk mencapai tujuan non ekonomi, misalnya memperoleh nilai, martabat atau untuk aktualisasi diri.

Masalah pengangguran itu sendiri tidak hanya terjadi pada negara-negara berkembang, namun juga dialami oleh negara-negara maju. Jelas bahwa masyarakat bakal semakin lelah jika masalah pengangguran dan kemiskinan terabaikan. Secara ekonomi, daya beli mereka akan melemah dalam memenuhi kebutuhan hidup layak minimumnya. Sementara secara psikologis mereka akan menderita mental yang tidak mudah terobati. Karena itu pemerintah perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada sekaligus mencari sumber-sumber ekonomi lainnya yang potensial.

Tabel 1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2017-2020

<i>No</i>	<i>Tahun</i>	<i>Sekolah Dasar</i>	<i>Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Sekolah Menengah Atas</i>	<i>Sekolah Menengah Kejuruan</i>
1	2017	3,08	3,19	11,29	7,26
2	2018	3,83	6,52	11,98	5,12
3	2019	6,06	3,3	6,87	11,2
4	2020	4,25	9,92	11,18	16,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat dianalisa bahwa TPT pada tingkat pendidikan pada tahun 2021, TPT untuk lulusan Sekolah Menengah kejuruan masih mendominasi sebesar 16,55 persen dan pada tahun 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 11,20 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,87 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA sedangkan dibandingkan kondisi setahun yang lalu yaitu tahun 2018, peningkatan TPT hanya terjadi pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan SMK. Sedangkan TPT pada tingkat pendidikan lainnya yaitu SMP dan SMA mengalami penurunan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan melibatkan dunia usaha dalam kurikulumnya akan mengurangi jumlah pengangguran dari lulusan kejuruan. Menurut dia, persoalan utama lulusan SMK adalah tidak adanya kesesuaian antara kebutuhan industri dan tenaga kerja. SMK juga dinilai mengalami kendala guru dan pengajar. Salah satu cara untuk mengatasi TPT bisa dengan peningkatan sertifikasi lulusan SMK melalui penguatan lembaga sertifikasi kompetensi dan penguatan pendidikan kewirausahaan di SMK melalui kerja praktik kewirausahaan. Kemendikbud terus berupaya meningkatkan daya serap lulusan SMK terhadap industri.

Tabel 2. Jumlah Lulusan SMK di Kabupaten Bintan Setiap Tahunnya

No	Nama SMKN Kabupaten Bintan	2018	2019	2020
1	SMKN 1 Gunung Kijang	79	58	76
2	SMKN 1 Bintan Timur	167	206	186
3	SMKN 1 Bintan Utara	247	262	254
4	SMKN 1 Sri Kuala Lobam	54	65	61
	Jumlah	547	591	577

Sumber: Hubungan Masyarakat SMKN Bintan

Jika dilihat dari tabel di atas maka dapat dianalisa bahwa jumlah lulusan SMK Negeri di Kabupaten Bintan pada setiap tahun berbeda-beda. Pada tahun 2018 jumlah lulusan SMK Negeri di Kabupaten Bintan sebanyak 547 lulusan, pada tahun 2019 meningkat menjadi 591 siswa/i lulusa. Pada tahun 2020 jumlah lulusan menjadi 577 siswa/i lulusan.

Strategi penanganan pengangguran sangat terpengaruh pada kinerja pemerintah dalam menangani masalah perekonomian seperti iklim investasi. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Salah satu kunci untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut adalah dengan memperbaiki iklim investasi yang dalam beberapa tahun terakhir ini melemah. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang tutup atau memindahkan usaha ke Negara lain. (Asian Development Bank, 2005:3).

Hal ini menjadi permasalahan bersama dimana terbukanya lapangan pekerjaan di Kabupaten Bintan tidak hanya untuk meyerap tenaga kerja lokal tetapi tenaga kerja Indonesia seluruhnya, tidak ada batasan mengenai tenaga kerja, belum lagi tenaga

kerja asing itu merupakan tenaga kerja profesional dengan pos-pos jabatan tinggi disetiap perusahaan tersebut. Sehingga tenaga kerja lokal harus mampu bersaing dengan tenaga kerja lainnya yang berasal dari luar Kabupaten Bintan. Berdasarkan gejala permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Strategi Kebijakan Mengatasi Pengangguran Terbuka Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kabupaten Bintan”.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi kebijakan mengatasi pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan. Penelitian ini penting dilakukan, mengingat tingginya persaingan dalam mencari pekerjaan, fakta lulusan SMK masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, serta tingginya persentase tingkat pengangguran lulusan SMK (2017-2020) yaitu sebesar 16,55 %.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Chandler dalam Rangkuti (2006:3) strategi adalah rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Konsep strategi menurut Tjiptono, (2000:6) dapat didefinisikan menjadi dua perspektif berbeda: 1) dari apa yang organisasi ingin lakukan dan 2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan. Dari perspektif pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan, mencapai tujuan dan mengimplementasikan program tersebut. Sedangkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungan sepanjang waktu.

Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *Government* yang hanya menyangkut aparaturnya Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan

keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik baik kehidupan warganya.

Menurut Carl J Federick (1969:79) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenaga kerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran atau mencari informasi jelas mengenai strategi kebijakan mengatasi pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bintan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena peneliti membahas tentang strategi kebijakan mengatasi pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bintan. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasinya adalah seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan berjumlah 26 orang dan seluruh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 50 orang.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3 yaitu Observasi yang digunakan adalah observasi sistematis yaitu observasi yang diselenggarakan dengan menentukan secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah *check list* yaitu daftar berisikan catatan-catatan yang bertujuan untuk memberikan masukan informasi awal mengenai masalah yang diteliti. Wawancara merupakan kegiatan untuk menarik informasi dan data dari sampel yang terpilih. Wawancara yang dilakukan dengan informan, dan peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan tentang strategi kebijakan mengatasi pengangguran terbuka lulusan SMK di Kabupaten Bintan, Studi Dokumen dalam penelitian ini mengumpulkan arsip-arsip tertulis yang berasal dari berbagai sumber baik dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan yang berkaitan dengan masalah pengangguran, serta bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: Peraturan Perundang-undangan, (UU, PP, Kepres, Keprem, Perda dan lain sebagainya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Startegi Organisasi

a. Perencanaan strategis terkait dengan pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan tidak memiliki perencanaan startegis khususnya untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan. Tetapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan mempunyai program-program untuk mengurangi pengangguran secara umum tidak ada yang terkhusus lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan.

Begitu pula dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang juga memiliki perencanaan startegis khususnya untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau membantu salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan untuk memfasilitasi Sarana Prasarana yang dibutuhkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan untuk lebih baik menjalani praktikum dengan sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah untuk meningkatkan sumber daya manusia atau lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih berkualitas dan siap kerja.

b. Ketentuan dan kebijakan terkait dengan pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanganan pengangguran terbuka memang belum ada, namun sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan mengacu pada PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja dimana pemerintah wajib mengadakan pameran kesempatan kerja adalah aktivitas untuk mempertemukan antara sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan. Untuk kebijakan mengatasi pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan juga tidak ada yang terkhusus untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan karena kebijakan secara luas menyangkup semua pengangguran.

Strategi Program

- a. Adanya program dan dampak program terkait dengan pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan

Belum ada program khusus yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan terkait dengan pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan melainkan program terkait dengan pengangguran yang ada di Kabupaten Bintan. Namun terdapat program-program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan yaitu adanya pelatihan tenaga kerja, kerja sama bersama pihak-pihak swasta, adanya sosialisasi pada sekolah-sekolah terkait dengan tenaga kerja dan informasi pasar kerja di Kabupaten Bintan., tetapi semenjak adanya Covid-19 ini untuk program pelatihan dan sosialisasi pada sekolah-sekolah itu tidak dilaksanakan. Begitu pula dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang juga memiliki adanya program dan dampak program terkait dengan pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau lebih tepatnya dalam bidang Sekolah Menengah Kejuruan ada program khusus yaitu program sekolah empat tahun yang mana tiga tahunnya masa pembelajaran dan tahun ke empat mencetak lulusan SMK siap kerja masuk ke industri-industri yang ada di Bintan, ada juga program 8+i Link and Match dan program memberikan dan memfasilitasikan prasarana dan sarana keperluan praktik kejuruan.

Strategi Pendukung Sumber Daya

- a. Memaksimumkan pemanfaatan sumber daya manusia terkait dengan pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten memaksimumkan pemanfaatan sumber daya manusia dalam menangani pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan dengan cara memberikan sosialisasi pada sekolah-sekolah sesuai bidang jurusannya dan diberikan pelatihan kerja dengan menghadirkan para pekerja industri yang sudah berpengalaman pada bidangnya masing-masing untuk meningkatkan kualitas kinerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bintan.

Begitu pula dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah memaksimumkan pemanfaatan sumber daya manusia dalam menangani pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan dengan adanya sosialisasi dari pihak industri untuk dapat memaksimumkan sumber daya manusia lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bintan yang siap bekerja. Dinas Tenaga Kerja juga mengarahkan jurusan yang diberikan oleh pusat untuk dapat disesuaikan dengan sekolah yang sesuai dengan kompetensi lingkungan jadi sumber daya manusianya juga sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi Kelembagaan

a. Adanya kerja sama dengan pihak-pihak swasta terkait dengan pengembangan kemampuan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan melakukan kerja sama dengan 17 perusahaan yang berada di Kabupaten Bintan dari Dinas. Selain itu, pihak Sekolah Menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan juga melakukan kerjasama dengan perusahaan industri yang ada di Kabupaten Bintan dalam rangka pelaksanaan praktek lapangan siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan kelas 2 atau kelas XI sesuai dengan jurusan masing-masing. Pihak sekolah juga memberikan laporan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian adalah tidak ada strategi khusus yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dalam mengatasi pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan. Tetapi terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan seperti program pada sekolah-sekolah, adanya kerja sama pihak Sekolah Menengah Kejuruan bersama industri yang berlokasi di

Kabupaten Bintan, sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program sekolah 4 tahun dan program 8+1 *Link and Match*.

Untuk program pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja itu tidak hanya berlaku untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan tetapi juga untuk umum. Khusus pelatihan untuk siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan itu sesuai dengan jurusan yang ada di Sekolah masing-masing. Untuk jurusan Sekolah Menengah Kejuruan diberikan dan diarahkan oleh pemerintah pusat sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau hanya mengarahkan apa saja yang sesuai dengan keadaan sumber daya manusia dan lingkungan dari sekolah tersebut, dan jurusan tersebut sekolah sendiri yang menentukan.

Untuk dampak dari program-program tersebut menjadikan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan lebih berkualitas dan siap kerja masuk kedalam perusahaan dan industri yang ada di Kabupaten Bintan. Jika lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan yang sudah mandiri itu menjadi indikator keberhasilan program yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dapat membuat strategi kebijakan khusus yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti terus meningkatkan sumber daya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bintan melalui peningkatan kualitas praktik dan pelatihan. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan kerjasama dengan industri maupun perusahaan yang ada di Kabupaten Bintan sehingga para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bintan dapat langsung bekerja pada industri dan perusahaan tersebut. Untuk penelitian dengan obyek dan tema yang sama maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengembangan penulis dan khususnya yang berkaitan strategi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang, Hariadi. 2005. Strategi Manajemen. Bayumedia Publishing. Jakarta: Daft.

Baswori dan Siskandar. 2012. Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja. Bandung: Karya Putra Darwati.

Bryson, John M. 2016. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Jakarta: Pustaka Belajar.

- David, Fred R. 2009. Manajemen Strategis. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hermes, Saroha. 2015. Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Kota Pekanbaru. JOM FSIP Vol.2 No.2.
- J. Salusu, M.A. Prof. Dr. 2015. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: PT Grasindo.
- Kuncoro, Murdijat. 2006. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Maleong, Lexy J. 2012. Metode penelitian kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rasdakarya.
- Narimawati, Umi. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.
- Pearce dan Robinson. 2008. Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian. Jakarta: Salemba Empat.
- Rangkuti, Freddy. 2014. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang. 2011. Manajemen Strategik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2014. Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Predamedia Groub.
- Sukirno, Sadono. 2008. Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2015. Makroekonomi Modern Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarsono, Sonny. 2009. Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta : Erlangga.
- Trilyano Hia, Haogozaro. Peran Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bintan Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Wilayah Kabupaten Bintan. Dalam Naskah Publikasi Ilmu Pemerintahan. 2017. Universitas Maritim Raja Ali Haji.